

Pengembangan Collaborative Governance dalam Rangka Pemulihan Sektor Pariwisata dan UMKM di Ponorogo

Diyana Purnama Sari¹, Farhan Prio Aji Dharma², Niken Karuniawanti³, Ekapti Wahjuni DJ^{4*}

^{1,2,3,4} Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

^{1,2,3,4} Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

email: diyanpurnama229@gmail.com¹, farhanprioajidharmaajidharma@gmail.com²,
nikenkarunia2@gmail.com³, ekapti_wahjuni@umpo.ac.id⁴,

Abstract

Collaborative Governance is a form of collaborative governance concept. This collaboration involves parties from the government, the private sector and also the community. Collaboration is carried out because of the interrelationships of each of these institutions. The development of collaborative governance can be used to evaluate the good or bad implementation of programs or activities carried out by one of the institutions. During the pandemic, the Ponorogo Regency Government is preparing a program in the context of economic recovery in the tourism and UMKM sectors. The restructuring of the program for economic recovery was due to the fact that the level of tourists at the beginning of the pandemic had decreased, so that the tourism sector and UMKM had to be upgraded again to restore the regional economy.

Keywords: Governance; Pandemic; Tourism; UMKM

Abstrak

Collaborative Governance merupakan salah satu bentuk konsep kolaboratif penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi ini melibatkan pihak dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat. Kolaborasi dilakukan karena adanya keterkaitan dari masing-masing institusi tersebut. Pengembangan collaborative governance dapat digunakan untuk meng-evaluasi baik buruknya implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh salah satu Lembaga. Dalam masa pandemi, Pemerintah Kabupaten Ponorogo sedang menyusun program dalam rangka pemulihan ekonomi di bidang pariwisata dan UMKM. Penyusunan kembali program untuk pemulihan ekonomi ini dikarenakan tingkat wisatawan pada awal masa pandemi mengalami penurunan sehingga sektor Pariwisata dan UMKM harus kembali ditingkatkan guna memulihkan perekonomian daerah. Program-program yang disusun harus memiliki pembaharuan atau inovasi untuk menarik minat wisatawan datang.

Keywords: Governance; Pandemi; Pariwisata; UMKM

*)Penulis Korespondensi

E-mail : ekapti_wahjuni@umpo.ac.id

Pembahasan

Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan masih berlangsung hingga tahun 2021. Pertambahan kasus berdasarkan data Satgas Covid hingga saat ini masih tergolong tinggi. Beberapa kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari PSBB hingga pada akhirnya Era New Normal. Pandemi ini banyak berdampak diberbagai sektor kehidupan, terutama pada sektor Perekonomian. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Di Indonesia sendiri, Sektor Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat berpengaruh. Sehingga dengan adanya Covid-19 dampak yang terlihat adalah menurunnya penghasilan dari pekerja dan penghasilan daerah yang berasal dari sektor pariwisata

Menurut Sambodo 2020, menyatakan bahwa pandemi pada sektor pariwisata berpengaruh serta berisiko terhadap ekonomi dengan adanya penutupan sementara hotel, restaurant, industri wisata lainnya ; pengurangan karyawan bisa berupa cuti/pemutusan hubungan kerja ; kesulitan Likuiditas, seperti gagal bayar kredit investasi dan moda kerja serta penutupan usaha secara permanen (Andi Setyo Pambudi, 2020). Kegiatan pariwisata tidak lepas dari perdagangan internasional karena terkait dengan pertukaran barang atau jasa antara suatu negara dengan negara lain. Perdagangan terjadi apabila salah satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat tetapi pihak lain tidak merasa

dirugikan. Semua kegiatan tersebut dilakukan menyesuaikan interaksi antara wisatawan dan industri pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatanya, gambaran interaksi inilah yang digambarkan sebagai interaksi permintaan dan penawaran dalam pariwisata (Andi Setyo Pambudi, 2020). Era New Normal atau Era Baru peraturan yang harus dilakukan/dilaksanakan sungguh-sungguh oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar segera terbebas dari wabah, salah satunya dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang ada. Peningkatan kembali minat dan daya tarik pariwisata tidak bisa hanya dengan semerta-merta membuat/membangun tempat wisata baru saja, namun bisa juga dengan berinovasi dan membangun wisata secara berkelanjutan. Mengapa dikatakan berkelanjutan? Berkelanjutan disini artinya tempat wisata yang telah dibangun ini bagaimana caranya agar tetap memiliki ketertarikan bagi wisatawan dan tidak membosankan meskipun wisata tersebut telah mengalami perubahan.

Pada Era New Normal masyarakat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang produktif, dimana Usaha Produktif masyarakat ini bisa dilakukan dengan inovasi baru pada UMKM. Dampak dari Covid tidak hanya berada di bidang pariwisata saja namun ini juga sangat mempengaruhi keberadaan UMKM untuk bertahan dan tetap berkelanjutan. Melakukan Inovasi dan Pembaharuan model bisnis menjadi tantangan baru bagi masyarakat demi memulihkan tingkat perekonomian. Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana sektor Pariwisata dan UMKM dapat dipulihkan kembali di masa pandemi dengan berbagai strategi dan cara (Silvatika, 2020).

Metode

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis etnografi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif, analisis data dilakukan secara induktif, dan penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi (Dian Suluh, 2020). Subyek penelitian ini adalah media-media yang terkait dengan sektor pariwisata juga UMKM di Ponorogo. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakkan dengan cara metode etnografi virtual yaitu observasi daring, dokumen dan kajian literature.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia insfrastruktur, menambah fasilitas, koordinasi antara aparaturn pemerintah dan pihak swasta, serta pemerintah juga memiliki peran untuk promosi pariwisata lokal maupun nasional ke daerah lain maupun luar negeri. guna mengembangkan dan mengelola pariwisata. Dimana pengelolaan dilakukan secara terencana dan menyeluruh hingga masyarakat bisa memperoleh manfaat dari adanya pengelolaan pariwisata mulai dari segi ekonomi, sosial, dan juga kultural (I Gede EPSS, 2020).

Kebijakan makro yang dikeluarkan dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berisi bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata mengacu pada model kondisi berupa potensi yang banyak dimiliki oleh daerah yaitu berupa wisata alam. Sedangkan untuk mengembangkan destinasi wisata daerah yang akan diterapkan mengacu pada kondisi potensi yang berupa wisata alam. Mengembangkan potensi wisata tentunya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari stakeholder yang terlibat, SDM, dana, fasilitas, serta program-program yang telah disusun (I Gede EPSS, 2020). Dengan adanya kerjasama dan juga dukungan dari stakeholder

diharapkan potensi pariwisata dan juga perkembangan UMKM di Kabupaten Ponorogo meningkat.

Hubungan kolaboratif antara sektor publik dan swasta bisa mempengaruhi perkembangan dari pariwisata. Menurut Bambang Kusbandrijo salah satu dosen Administrasi Publik, Untag Surabaya menjabarkan mengenai *collaborative governance* merupakan cakupan kemitraan institusi pemerintah dalam bidang pelayanan publik. Dimana didalamnya terdapat sebuah pendekatan dalam pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serta serangkaian kerjasama untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab bersama. Selain itu kolaborasi juga meliputi segala aspek pengambilan keputusan, pengimplementasian, dan evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya dimana individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, sedangkan *collaborative governance* menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama. Perkembangan dari pariwisata dapat dilihat berdasarkan hubungan kolaboratif antara sektor publik dan swasta. Pariwisata mencakup kenyataan yang jauh lebih kompleks yang diilustrasikan dalam uraian berikut :

1. Sektor swasta, sebagai penghasil utama dan pemasok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengunjung. Dalam hal ini terdiri dari keragaman unit ekonomi yang ditentukan sebagai fungsi ukuran dan luasnya baik dari usaha mikro, kecil, menengah dan besar, baik lokal, regional, nasional atau transnasional yang terdiri dari berbagai bidang kegiatan produktif mulai dari manufaktur, perdagangan, transportasi, ke berbagai layanan seperti perhotelan, layanan makanan dan minuman, kegiatan budaya dan rekreasi.
2. Sektor publik, peran yaitu mempengaruhi bagaimana pariwisata dikembangkan di suatu negara atau wilayah (pengembangan infrastruktur, perencanaan, kebijakan transportasi, masalah fiskal, pekerjaan, dll.) juga ditandai oleh beragamnya aktor dan agen yang hidup berdampingan.

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak potensi wisata dan juga paket lengkap baik dibidang seni budaya, alam, religi, dan bahkan sampai kuliner. Sebelum adanya pandemi, fokus pembangunan pada upaya dukungan peningkatan penguatan destinasi pariwisata prioritas (DPP) dan revitalisasi Destinasi Bali (Andi Setyo Pambudi, 2020). Namun dengan adanya pandemi membuat Pemerintah Pusat maupun Daerah bekerjasama untuk meningkatkan pariwisata lokal yang berkelanjutan. Pariwisata memberikan dampak terciptanya lapangan pekerjaan, selain itu pariwisata juga menciptakan dampak secara tidak langsung dan dampak induksi terhadap industri lain termasuk di dalamnya yaitu UMKM sehingga bisa mensejahterakan masyarakat dan juga Daerah. Dengan tingginya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata menjadikan sektor ini sebagai sektor utama yang merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan valuta asing, mendorong industri pendukung lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga mempromosikan keindahan alam dan budaya di Indonesia (Andi Setyo Pambudi, 2020).

Peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata begitu penting, mengingat tanpa pemerintah maka sektor pariwisata suatu daerah tidak akan mampu dikelola dengan baik, karena pemerintah adalah stakeholder yang memiliki peranan paling besar terhadap kemajuan sektor pariwisata pada suatu daerah yang akan berdampak terhadap pendapatan daerah. Upaya pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan legitimasi atau ketentuan/ketetapan untuk melindungi dan sekaligus mengembangkan pariwisata.

Potensi pariwisata di suatu daerah perlu ditingkatkan dalam proses merencanakan pengembangan wisata. Pengembangan pariwisata di Indonesia khususnya di Kabupaten Ponorogo harus disesuaikan dengan bentuk pariwisatanya. Perlu adanya perencanaan, pihak yang mengelola, kerja sama

dengan masyarakat lokal dan sektor swasta, promosi, dan pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu, faktor biologi, kebiasaan, sumber daya alamnya juga harus diperhatikan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan maupun masyarakat sekitarnya. Dengan menggunakan strategi dan sistem yang tepat, serta fasilitas pendukung dan juga kemudahan akses, tentu saja hal ini bisa membuat potensi besar bagi Kabupaten Ponorogo dalam rangka membantu memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

Kesimpulan

Indonesia bahkan seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan masih berlangsung hingga tahun 2021. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19. Pemerintah memiliki peran sebagai penyedia infrastruktur, menambah fasilitas, koordinasi antara aparat pemerintah dan pihak swasta, serta pemerintah juga memiliki peran untuk promosi pariwisata lokal maupun nasional ke daerah lain maupun luar negeri. Pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata mengacu pada model kondisi berupa potensi yang banyak dimiliki oleh daerah yaitu berupa wisata alam. Sedangkan untuk mengembangkan destinasi wisata daerah yang akan diterapkan mengacu pada kondisi potensi yang berupa wisata alam. Hubungan kolaboratif antara sektor publik dan swasta bisa mempengaruhi perkembangan dari pariwisata. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya dimana individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, sedangkan collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama. Perkembangan dari pariwisata dapat dilihat berdasarkan hubungan kolaboratif antara sektor publik dan swasta.

Kabupaten Ponorogo memiliki banyak potensi wisata dan juga paket lengkap baik dibidang seni budaya, alam, religi, dan bahkan sampai. Namun dengan adanya pandemi membuat Pemerintah Pusat maupun Daerah bekerjasama untuk meningkatkan pariwisata lokal yang berkelanjutan. Potensi pariwisata di suatu daerah perlu ditingkatkan dalam proses merencanakan pengembangan wisata. Perlu adanya perencanaan, pihak yang mengelola, kerja sama dengan masyarakat lokal dan sektor swasta, promosi, dan pemberdayaan masyarakatnya.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah mendukung kajian ini

Daftar Pustaka

- Abd Hannan, F. R. (2020). Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* , 98-120.
- Andi Setyo Pambudi, M. F. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana* , 1-21.
- Azhari, A. K. (2018). Pengelolaan Potensi Wisata di Daerah Otonom Bertumpu Kreativitas dan Inovasi Aparatur Pemerintah Daerah. *Journal of Tourism and Creativity* , 104-119.
- Dian Suluh Kusuma Dewi, A. R. (2020). Internasionalisasi Budaya Lokal : Pemerintah Ponorogo Dalam Memperkenalkan Budaya Lokal Ke Internasional. *Prosiding Simposium Nasional* , 628-634.
- Hilman, Y. A. (2019). Ponorogo is Wonderfull. Ponorogo: CALINA MEDIA.

- I Gede Eko Putra Sri Sentanu, M. (2020). Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* , 1-20.
- Silvatika, B. A. (2020). Technosociopreneur, New Model UMKM di Era New Normal. *Prosiding Seminar Stiami* , 29-35.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi* , 76-86.
- Sutiarso, M. A. (n.d.). Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata. 1-11.
- Widari, D. A. (2020). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Kajian Teoretis Dan Empiris. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata (JKTP)* , 1-11.